



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 881/IV/IX/2015

KOMISI XI DAN PEMERINTAH SEPAKAT PERTUMBUHAN EKONOMI 5,3 PERSEN



**PANJA PELINDO II
BONGKAR TIGA
MASALAH KRUSIAL**



**DPR RI TURUT
BERDUKA ATAS
TRAGEDI MINA DI
ARAB SAUDI**

Jangan lewatkan
info DPR terkini
dan live streaming
TV Parlemen di
www.dpr.go.id



Komisi XI dan Pemerintah Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen



Pimpinan Komisi XI DPR raker dengan Pemerintah

Komisi XI DPR dan Pemerintah akhirnya menyepakati asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2016. Asumsi pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 5,3 persen. Angka tersebut dinilai lebih realistis di tengah perkembangan ekonomi global hingga tahun depan.

Kesepakatan ini sesuai dengan yang telah diusulkan oleh Pemerintah, namun sekaligus merevisi asumsi yang diajukan dalam Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 14 Agustus 2015 lalu, sebesar 5,5 persen.

Dalam pandangan masing-masing fraksi yang disampaikan sebelumnya, empat fraksi berasumsi 5,3 persen, tiga fraksi berasumsi 5,2 persen, dan

tiga fraksi lainnya dalam kisaran 5,1-5,3 persen.

“Kita berusaha agar besaran asumsi makro ini realitis. Saya kira asumsi makro ini bisa menjawab tantangan global di tahun mendatang. Kita juga optimis, di akhir tahun 2015 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin membaik,” yakin Ketua Komisi XI DPR Fadel Mohammad (F-PG), usai raker, di Gedung Nusantara I, Selasa (22/09/15) malam.

Dalam raker ini, Pemerintah diwakili Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin.

Kesepakatan berikutnya, lanjut Fadel,

asumsi inflasi dan SPN 3 bulan, dipatok masing-masing 4,7 persen dan 5,5 persen. Sedangkan untuk asumsi nilai tukar rupiah disepakati Rp13.900 per dolar AS, lebih rendah dibandingkan asumsi dalam nota keuangan Rp13.400 per dolar AS.

Untuk asumsi nilai tukar rupiah, lima fraksi berasumsi Rp13.900 per dolar AS, dua fraksi berasumsi Rp14.000 per dolar AS, satu fraksi berasumsi Rp13.800 per dolar AS, dan dua fraksi dalam kisaran Rp13.700-Rp14.000 per dolar AS.

Dalam raker ini, tambah Fadel, juga disepakati target pembangunan, yang meliputi tingkat pengangguran sebesar 5,2-5,5 persen, tingkat kemiskinan 9-10 persen, indeks gini ratio (indeks untuk mengukur tingkat kesenjangan) 0,39 dan indeks pembangunan manusia 70,1 melalui penghitungan metode terbaru.

“Terkait besaran tingkat pengangguran maupun gini rasio, Pemerintah harus bekerja keras mencapai hal itu. Kita minta alokasi anggaran dari Pemerintah, dan pembiayaan diperbaiki. Jika usaha Pemerintah masih biasa-biasa saja, maka target tidak akan tercapai,” ingat politikus asal dapil Gorontalo itu.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan mengingatkan, kesepakatan asumsi makro RAPBN 2016 ini harus memberikan sinyal optimisme kepada pasar. Namun harus optimisme yang realistis, dan bukan hanya sekedar mengawang-awang.

“Angka-angka ini memang perlu kerja keras dari Pemerintah. Tapi paling tidak kita menunjukkan kepada *market* dan masyarakat Indonesia, bahwa kita akan berjuang, bukan diam saja,” kata politikus F-PD itu.

BULETIN PARLEMENTARIA

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH: Dr.

Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum (Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) ; Tatang Sutarsa, SH (Deputi Persidangan dan KSAP)

PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag

Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR: M. Ibnur Khalid; Iwan Armanias; Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos; Ketut Sumerta, S. IP

ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos; Supriyanto; Agung Sulistiono, SH; Rahayu Setiowati; Muhammad Husen; Sofyan Effendi

REDAKTUR FOTO: Eka Hindra

FOTOGRAFER: Rizka Arinindya; Naefuroji; M. Andri

Nurdriansyah; Yaserto Denus Saptoadji; Andi Muhamad; Jaka Nugraha

SIRKULASI: Abdul Kodir, SH

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:

BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.III Gedung Nusantara

II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp.

(021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com; www.dpr.go.id/berita

Marawan menambahkan, optimisme ini juga didukung oleh analisis yang kredibel. Asian Development Bank (ADB) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 diharapkan mencapai 5,4 persen.

“Sehingga, angka 5,3 persen yang kita sepakati ini, sudah realistis. Ini memberikan sinyal kepada pasar, bahwa kita ingin bekerja. Kita ingin optimis yang realistis,” imbuh politikus asal dapil Lampung ini.

Rapat dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan, dan hasil raker akan dibawa ke Badan Anggaran untuk dibahas lebih lanjut. (SF) FOTO: JAKA/PARLE/HR

DPR TURUT BERDUKA ATAS TRAGEDI MINA



Ketua DPR RI Setya Novanto mengunjungi korban tragedi Mina asal Indonesia

Ketua DPR RI, Setya Novanto mengucapkan belasungkawa dan duka cita atas terjadinya peristiwa Mina. Hal itu diungkapkannya, Kamis (24/9) langsung dari tanah suci.

“DPR RI mengucapkan duka cita atas terjadinya peristiwa Mina. Kami juga mendoakan seluruh jemaah haji yang meninggal dunia khushul khotimah, diberi tempat terindah di sisi Allah SWT. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan atas musibah ini,” ungkap Setya Novanto.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini juga berharap agar tidak ada lagi peristiwa lainnya hingga seluruh jemaah haji dapat menyelesaikan ibadah dan kembali ke tanah air dengan selamat dan sehat.

Senada dengan Ketua DPR RI, melalui siaran pers nya Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Fahri Hamzah mengucapkan belasungkawa atas tragedi Mina. Lebih lanjut ia menjelaskan secara kronologis tragedi Mina mungkin terjadi akibat penumpukan yang seolah tidak diatur dan tidak bisa dihindari dalam menjalankan setiap prosesi ibadah haji.

“Hanya prosesi wukuf di Arafah yang disepakati sebagai titik dimana seluruh jemaah haji dari seluruh negara dan mazhab berada di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah (Rabu, 23 September 2015), maka selanjutnya, apa yang terjadi setelah Arafah tidak diatur regulasinya, tidak dikomunikasikan secara ketat dan diserahkan pada masing-masing negara

dan bahkan masing-masing jemaah. Maka berbondong-bondonglah mereka yang ingin segera menuntaskan rukun dan wajib haji ke Mina untuk melontarkan jumroh pada saat yang sama. Inilah yg terjadi pada jalur musibah itu,” jelas Fahri.

Dengan demikian ditambahkan Fahri, dapat dipastikan bahwa yang menjadi korban adalah mereka yang memutuskan untuk berangkat melontarkan jumroh sehabis subuh, karena kejadiannya sekitar jam sembilan pagi. Padahal di saat yang sama Masjidil Haram sedang berlangsung Sholat Iedul Adha.

“Memang pemerintah Saudi sudah membangun banyak jalur setelah kejadian Mina yang menelan korban hampir 1500 orang tahun 1990. Tetapi, rasanya pergerakan jemaah masih sangat tidak terkendali dan juga tidak terfasilitasi,” ungkapnya.

Dikutip dari siaran persnya, politisi dari Fraksi PKS ini mengatakan setelah tragedi jatuhnya crane beberapa waktu lalu dan tragedi Mina yang berulang, maka selayaknya Indo-



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Jamarot

nesia mengambil inisiatif untuk mendesak pemerintah Saudi agar membicarakan penyelenggaraan haji secara bersama-sama. Meski demikian Fahri juga mengapresiasi Amirul Hajj dan Menteri Agama Indonesia yang cukup berani menyentil pemerintah Saudi dalam sambutan menjelang wukuf kemarin maka tentu ini harus diteruskan.

“Menteri Agama RI kemarin menyatakan bahwa Saudi harusnya bisa membangun fasilitas yang lebih baik bagi jemaah karena Saudi punya segala kemampuan untuk itu. Hal ini agar tragedi yang berulang ini tidak oleh dianggap sebagai bagian dari haji. Padahal ini adalah musibah yang harus dihindari,” pungkasnya melalui siaran pers nya. (AYU) FOTO: DOK./PARLE/HR

PERLU UU ATUR STANDARISASI GAJI PEJABAT DAN DIREKSI BUMN



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

Wakil Ketua DPR Taufik Kuriniawan menegaskan, tidak hanya dialami DPR sekarang, DPR periode sebelumnya juga telah membahas masalah standarisasi gaji pejabat negara dan gaji direksi BUMN. “Jadi siapapun Presidennya, siapapun pemerintahannya ini kita luruskan bersama-sama. Ini sebetulnya hutang DPR periode sebelumnya. Pernah dibahas tapi karena ada pemilu legislatif dan pilpres akhirnya tertunda pembahasannya,” kata Taufik di Jakarta, Senin (21/9).

Menurut Pimpinan DPR Koordinator Ekonomi-Kuangan ini, masalah tersebut jangan sampai lepas dari perhatian publik dan menjadi salah satu topik hangat saat rapat konsultasi Kementerian Keuangan dengan Pimpinan DPR

dan Pimpinan Fraksi-fraksi.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa perlunya diatur standarisasi gaji pejabat dan Direksi BUMN karena ada hal yang aneh dan tidak wajar. Seorang direksi BUMN gajinya selangit ditambah bonus dan tantim, yang sampai ratusan juta, sementara seorang Presiden tidak sampai ratusan juta. Padahal, bagaimanapun Presiden adalah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, kalau di swasta adalah CEO- Presiden Direktur.

“Mana mungkin Presiden Direktur gajinya lebih rendah dari pada supervisornya atau lebih rendah dari manajernya. Makanya akan kita tata,” tambah politisi PAN ini.

Khusus mengenai gaji Direksi BUMN, Taufik mengatakan, sering kali menjadi hal yang dilematis karena BUMN memiliki aset yang hampir empat kali lebih besar dari APBN. Aset BUMN ada yang lebih dari 4.000 T sedangkan APBN hanya sekitar 2.000 T dan semua itu adalah uang rakyat atau uang publik.

Ia kembali menyoroti besarnya *take home pay* para direksi BUMN ada yang sangat fantastis, ada yang Rp 200 juta, ada yang Rp 300 juta belum bonusnya. Yang lucu, ada BUMN rugi tapi gajinya direksinya selangit. “Jangan hanya menyoroti anggaran kasur, toilet tetapi yang jumlahnya triliunan lepas dari pengawasan masyarakat,” ujarnya dengan menambahkan, DPR intinya tidak hanya ingin adanya penyesuaian, tetapi dibuat standarisasi.

BUMN, lanjut Taufik, rujukannya

adalah Kemenku dan Bappenas, tidak hanya kepada Kemenku saja karena disitu ada RUPS ada Penyertaan Modal Negara (PMN). Lalu logikanya bagaimana, ada BUMN minta PMN, kemudian disetujui bersama dengan DPR tapi gaji direksi BUMN lebih tinggi dari Presidennya bahkan empat kali lipat.

Supaya tidak terpecah, Pimpinan Dewan ini mengajak untuk konsentrasi dulu pada RAPBN 2016 sambil menunggu situasi ekonomi yang sedang tidak bersahabat, diharapkan ekonomi bisa *leading* kembali, sudah disiapkan perangkat UUnya. “Jangan dibalik, ekonomi sedang lemah apa layak menaikkan tunjangan. Akan kita atur, tidak harus naik, bisa juga diturunkan. Bahkan bisa dijalankan kebijakan *tight money policy* (kebijakan uang ketat) untuk direksi BUMN yang gajinya 500 atau 400 juta diturunkan sesuai aturan yang ada,” tegasnya.

Selanjutnya, tambah dia, ujung dari standarisasi di BUMN adalah penerapan indikator kinerja. BUMN yang rugi konsekuensinya tidak bisa disamakan dengan BUMN yang untung. Apalagi BUMN rugi, direksinya dapat bonus, hal-hal seperti ini yang harus diluruskan sebab menyangkut uang triliunan yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. “Prinsipnya bukan bicara per institusi tetapi secara global kita buat aturan perundangannya dan menjadi acuan penetapan gaji pejabat dan direksi BUMN,” pungkasnya. (MPI/

FOTO: JAKA/PARLE/HR

Pemerintah Diminta Budayakan Olahraga di Masyarakat

Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisjam meminta Pemerintah membudayakan kegiatan olahraga kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada para generasi muda. Pasalnya, akibat kurangnya budaya olahraga ini, berdampak negatif kepada generasi penerus bangsa ini.

“Membudayakan olahraga itu perlu kita galakkan, karena kita prihatin dengan kondisi saat ini, dimana generasi

muda kita, khususnya pelajar, terjerumus ke hal-hal negatif di sekolah. Sekolah sudah menjadi tempat yang menakutkan,” kata Hisjam, usai RDP dengan jajaran Eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga, di Gedung Nusantara I, Selasa (22/09/15).

Hisjam khawatir, kondisi sekolah yang terkadang sudah tidak kondusif lagi ini, membuat khawatir orang tua untuk menyekolahkan anaknya. “Padahal, dua

hingga tiga dekade yang lalu, sekolah menjadi tempat untuk anak-anak belajar dan bermain yang nyaman,” imbuhnya.

Politikus F-PG ini yakin, jika budaya olahraga bisa dioptimalkan, akan memberikan dampak positif kepada anak. Selain sehat, tentunya dapat memberikan pelajaran tentang sportifitas.

“Oleh karena itu, Pemerintah harus membudayakan olahraga kembali di



Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisjam

dalam program kerjanya, agar generasi muda kita menjadi anak-anak yang

sehat dan memiliki jiwa sportif,” papar Hisjam.

Untuk membudayakan olahraga, Kemenpora sudah memprogramkan olahraga sepakbola di desa-desa. Komisi X mengapresiasi dan mendukung hal itu. Namun, program ini masih menemui kendala terkait kepemilikan tanah.

“Jangan sampai tanah yang sudah ada, ternyata diklaim oleh pihak lain, itu harus miliki desa, dan dibuat hibah kepada Pemerintah. Jangan sampai Pemerintah sudah menggelontorkan anggaran, tapi tanahnya bermasalah,” khawatir politikus dari dapil Jawa Timur itu.

Hisjam mengakui, masih banyak jenis olahraga lain yang bisa dikembangkan. Namun olahraga sepakbola dinilai lebih mudah dan memasyarakat.

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga mengatakan, persentase penduduk yang melakukan kegiatan olahraga setiap tahunnya hanya 2 persen. Untuk itu, pihaknya membuat beberapa kegiatan pada tahun 2016 untuk membudayakan olahraga, diantaranya melalui penguatan olahraga tradisional, program kecamatan layak olahraga, hingga kampanye gerakan pembudayaan olahraga. (SF) FOTO: JAKA/PARLE/HR

Pemerintah Harus Kaji Ulang Biaya Penyelenggaraan Asian Games 2018



Kontingen Indonesia di Asian Games 2014

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga diminta untuk mengkaji ulang anggaran untuk pembayaran penyelenggaraan Asian Games 2018 kepada Dewan Olimpiade Asia (OCA). Pasalnya, selain pembayaran ini jumlahnya cukup besar, juga harus menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat.

“Kami berharap Kemenpora dapat meninjau ulang anggaran untuk penyelenggaraan Asian Games ini. Karena dana yang kita dapatkan dalam bentuk rupiah ini, harus kita tukar ke mata uang dolar AS. Apalagi, anggaran Kemenpora tahun depan, sedikit menurun dibanding tahun 2015,” kata Wakil Ketua Komisi X, Ridwan Hisjam, usai RDP dengan jajaran Eselon I Kemenpora, di Gedung Nusantara I, Selasa (22/09/15).

Sebagaimana diketahui, untuk menyelenggarakan Asian Games, Indonesia harus membayar uang jaminan pelaksanaan Asian Games 2018 kepada OCA. Dana jaminan Asian Games 2018 ditetapkan senilai 2 juta dolar AS atau setara dengan Rp 28 miliar.

Dana itu akan diserahkan ke OCA sebagai badan penyelenggara olahraga internasional di kawasan Asia. Keterselesaian anggaran itu, merupakan tanggung jawab Kemenpora sebagai tuan rumah dan penanggung jawab pelaksanaan gelaran olahraga negara-negara Asia itu. Namun, anggaran tersebut dimaksudkan sebagai dana antisipasi jika gelaran

Asian Games itu gagal.

Menurut kontrak, kegagalan tersebut bisa lantaran bencana alam atau pun kegagalan akibat dampak politik. Akan tetapi, jika pelaksanaan Asian Games itu berjalan tanpa hambatan, anggaran tersebut akan dikembalikan ke tuan rumah.

Selain bertanggung jawab untuk menyetorkan dana darurat, Kemenpora juga diwajibkan mengeluarkan anggaran promosi Asian Games senilai 15 juta dolar. Dana tersebut, untuk biaya promosi hajatan dengan cara standar internasional. Selain itu, Kemenpora juga ditetapkan untuk menyediakan dana senilai 30 juta dolar untuk biaya penyiaran ke seluruh peserta Asian Games.

Sementara di dalam negeri, anggaran penyelenggaraan Asian Games ini akan dialokasikan dalam empat termin mulai dari 2015 hingga 2018 mendatang. Detailnya, untuk 2015, Kemenpora mengusulkan anggaran sebesar Rp 878 miliar, lalu di 2016 usulan yang akan diajukan adalah Rp 1,5 triliun. Di 2017 adalah Rp 1,8 triliun dan puncaknya di 2018 dengan total anggaran terbesar yakni Rp 3,4 triliun.

Hisjam menilai, anggaran itu cukup besar, terutama pada kondisi perekonomian Indonesia yang sedang menurun saat ini. Ia sempat berujar, jika memang penyelenggaraan Asian Games 2018 justru malah memberatkan Pemerintah, lebih baik tidak usah dibayar. Dengan arti, Indonesia tidak perlu menjadi tuan rumah Asian Games.

“Dari awal, kita sudah menyiapkan dana pendamping, itu wajar. Tapi jangan sampai memberatkan. Kalau dana pendamping sekitar Rp 100 miliar masih cukup wajar, dengan asumsi kita akan mendapatkan profit beberapa triliun dari pelaksanaan Asian Games ini,” harap Hisjam.

Politikus F-PG ini sempat khawatir, jika kondisi ekonomi di tahun mendatang semakin tidak mendukung, dan tidak memungkinkan pembangunan venue yang direncanakan, mungkin Indonesia tidak memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Asian Games.

“Ini menjadi salah satu pertimbangan Komisi X DPR kenapa meminta Pemerintah perlu meninjau kembali anggaran untuk Asian Games ini,” imbuh Hisjam.

Politikus asal dapil Jawa Timur ini juga berharap, Pemerin-

tah harus berorientasi pada *profit* atau keuntungan. Karena nanti akan banyak tamu dari luar negeri.

“Jadi selain negara kita semakin dikenal oleh dunia, pariwisata Indonesia juga semakin dikenal oleh tamu dari luar negeri. Maka kita akan mendapatkan keuntungan. Sehingga

penyelenggaraan Sea Games ini, sebaiknya diberikan kepada tokoh olahraga yang mengerti *entrepreneur*, sehingga nantinya mendapatkan untung, bukan malah terbebani dengan besaran APBN kita,” saran Hisjam. (SFI/FOTO:IST./PARLE/



Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly diminta untuk membenahi aparatnya. Hal ini bertujuan agar dapat menyadarkan dan mendidik orang untuk kembali ke jalan yang benar.

“Apapun argumentasi dari Kanwil, Menteri Hukum dan HAM itu tidak benar dan sudah menyalahi prosedur, faktanya Gayus telah keluar lapas,” kata anggota Komisi III DPR Ruhut Poltak Sitompul di Jakarta, Selasa (22/9).

Dikatakan Ruhut, keluarnya Gayus

GAYUS KELUYURAN, MENKUMHAM DIMINTA BENAH APARATNYA

dengan alasan keluarga seperti perceraian atau pernikahan meski menurut undang – undang dibolehkan, tidak semua bisa diizinkan keluar lapas. Apalagi Gayus seorang terpidana kasus besar.

Terkait sanksi para koruptor untuk mengembalikan uang kepada negara, Ruhut mengatakan, orang seperti Gayus yang sudah dipenjara dan dihukum, tidak mungkin mau mengembalikan uangnya. Yang dikembalikan pasti tidak semua dan pasti masih ada sisanya.

“Banyak tahanan apabila diminta untuk mengembalikan uangnya kepada negara, lebih memilih ditambah hukuman. Rata-rata para tahanan koruptor tidak mau mengembalikan uang hasil korupsinya, bahkan lebih memilih pasang badan dan ditambah hukuman-

nya,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Sementara anggota Komisi III DPR Andika Hazrumy mengatakan, perbuatan Gayus itu tidak etis, kalau hanya sekedar makan bisa dilakukan di dalam lapas bukan harus keluar lapas. Dia mengakui, memang apabila seseorang terdakwa sedang dalam proses bagi waris atau perceraian di pengadilan yang mewajibkan terdakwa hadir, namun tetap dengan pengawasan sampai ke pengadilan bukan dalam kapasitas lain.

“Perbuatan Gayus Tambunan itu adalah tidak etis dan di luar kepentingan pengadilan. Seharusnya pihak yang mengawal memberikan larangan kepada Gayus karena perbuatan yang dilakukan melanggar Undang-Undang,” tegas Andika. (SPY,MP) FOTO:

NAEFUROJI/PARLE/IW

Serapan Anggaran Lemhannas Mengecewakan



Anggota Komisi I DPR Marinus Gea

Anggota Komisi I DPR RI Marinus Gea mengatakan serapan anggaran Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada APBN 2015, sampai triwulan ketiga dinilai masih rendah. Kondisi ini jelas mengecewakan anggota dewan karena harapan perbaikan atau setidaknya sama dengan tahun lalu

akan sulit tercapai.

“Tadi kita mendapat laporan serapan anggaran 2014 mencapai 95 persen sementara untuk 2015 sampai 31 Agustus lalu baru mencapai 31,46 persen. Kita khawatir dalam tempo sesingkat ini, apa bisa lebih baik atau setidaknya sama dengan tahun lalu. Ini tentu mengecewakan kita,” katanya usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/15).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Banten III ini menekankan pentingnya Lemhannas untuk menggenjot kinerja sampai menjelang akhir tahun. Isu lain yang mengemuka dalam rapat dengar pendapat yang juga dihadiri Sekjen Wantannas adalah tentang rencana pembentukan Badan Cyber Nasional serta beberapa permasalahan lain.

Rapat yang dimulai sejak pukul 10.00WIB berlangsung tertutup, menurut politisi Fraksi PDIP ini karena ada isu yang masuk kategori rahasia negara dan tidak menjadi konsumsi publik. Dari sejumlah pembahasan ada agenda yang perlu disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota dewan.

Bicara pada kesempatan berbeda anggota Komisi I dari

Fraksi PPP Dimiyati Natakusumah mengatakan peran Lemhannas sebagai lembaga *think tank* negara belum optimal. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian bagi sejumlah pemikir terbaik dari sipil dan militer yang berkantor di kawasan Merdeka Selatan ini.

“Lemhannas ini kita harapkan sekali bisa menjadi lembaga *think tank* utama bagi bangsa, bisa memberikan masukan kepada presiden, lembaga negara lain termasuk DPR. Ini yang belum optimal,” demikian Dimiyati. (IKYI/FOTO:NAEFURODJI/PARLE/HR)

Panja Pelindo Jangan Grubak-grubuk, Ganggu Investor



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menegaskan, masalah Pelindo II sudah menjadi salah satu bagian dari pengawasan DPR. Karena itu diharapkan pembentukan panitia kerja (panja) di beberapa komisi akan bisa menyelesaikan

masalahnya dengan tuntas.

Menanggapi sikap beberapa Komisi yang akan membentuk panja, selaku Pimpinan DPR bisa memahami keinginan mereka. Pasalnya alat kelengkapan Dewan (komisi) itu bisa menjadi mitra kerja Pelindo. Otoritas kepelabuhanan yang terkait dengan imigrasi menjadi tugas Komisi III, terkait pelabuhan dan infrastruktur bidang Komisi V dan BUMN bidang Komisi VI serta aspek ketenagakerjaan menjadi bidang Komisi IX.

Namun, lanjut Taufik, tidak menutup kemungkinan panja-panja dari berbagai Komisi itu digabungkan menjadi satu Pansus. “Sekarang ini, biarkan masing-masing komisi melakukan pendalaman terlebih dahulu sehingga kalau sudah terkumpul, supaya efektif terarah dengan tujuan yang jelas, lalu dibantu Pansus,” katanya.

Pembentukan Pansus, juga dikatakan Pimpinan Dewan dari Fraksi PAN ini jangan hanya faktor kepentingan dan itu memang tidak boleh. “Pembentukan Pansus dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan untuk dikembalikan kepada pelabuhan. Jangan sampai grubuk-grubuk sehingga mengganggu dan mengganggu minat investor. Harus dicari akar permasalahannya dimana, kemudian bisa diselesaikan dengan tuntas,” tandasnya. (MPI/FOTO:ANDRI/PARLE/IW.)

KETUA KOMISI IV TOLAK WACANA MENTERI KKP



Ketua Komisi IV Edhy Prabowo

Ketua Komisi IV Edhy Prabowo menolak dengan tegas wacana Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan memberikan izin 100 persen kepada

pihak asing dalam melakukan pengolahan ikan di Tanah Air.

Dalam keterangan persnya, Selasa (22/9) di Jakarta, Eddy menegaskan, bila wacana tersebut dilaksanakan akan sangat merugikan rakyat.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, beberapa waktu lalu Menteri KKP kerap membuat heboh media karena menenggelamkan kapal asing di laut karena mencuri ikan. “Lantas kenapa memberi karpet merah kepada pihak asing dengan memberi izin kepada pihak asing pengolahan di darat,? tanya dia.

Ia kemudian mengungkap data bahwa sebanyak 637.000 orang yang bergantung hidup di bidang kelautan dan perikanan disinyalir akan menjadi korban PHK. Jumlah itu terdiri dari

anak buah kapal (ABK), buruh pengolahan ikan, pembudidaya kepiting dan rajungan, pembudidaya ikan kerapu, penangkap benih lobster dan pembudidaya lobster.

Kondisi itulah kata Eddy Parobowo, yang seharusnya dipikirkan Pemerintah dalam hal ini Menteri KKP, ketimbang memberikan izin 100 persen kepada pihak asing dalam melakukan pengolahan ikan. (AS) FOTO:RY, IST./PARLE/HR



Keputusan The Fed Pengaruhi Asumsi Makro RAPBN 2016



Anggota Komisi XI DPR Amir Uskara

Anggota Komisi XI DPR Amir Uskara mengatakan, keputusan penundaan kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat oleh The Fed, sangat mempengaruhi pembahasan Asumsi Makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2016.

Hal itu ia sampaikan di sela-sela Rapat Kerja antara Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPB/Kepala Bappenas, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Gubernur Bank Indonesia, di Gedung Nusantara I, Senin (21/09/15) malam. Raker dipimpin Ketua Komisi XI Fadel Muhammad (F-PG, Dapil Gorontalo).

“Asumsi Makro dalam RAPBN yang di dorong pemerintah sampai saat ini, saya kira dipengaruhi oleh keputusan The Fed. Penundaan ini akan memberikan pengaruh semakin panjang. Pemerintah katanya akan mendiskusikan kembali, dengan mempertimbangkan kondisi global, salah satunya keputusan The Fed itu,” kata Amir.

Politikus F-PPP itu mengatakan, semakin cepat The Fed

memutuskan, dan memberikan kepastian, itu akan memudahkan untuk menetapkan besaran asumsi makro. Akibat tidak ada kepastian ini, salah satunya juga memberikan ketidakpastian kurs rupiah.

“Komisi XI berharap Pemerintah memasang rentang kurs rupiah yang sempit. Misalnya nilai kurs rupiah yang diusulkan dalam asumsi makro nanti antara Rp 13.400 sampai Rp 13.900, tapi ini masih terlalu luas. Kita ingin dipersempit, misalnya di Rp 13.500 sampai Rp13.600,” kata Amir.

Amir mengakui, sampai saat ini pihaknya dan Pemerintah belum sepakat untuk menentukan angka-angka dalam asumsi makro RAPBN 2016. Pihaknya ingin, Pemerintah memantapkan di internalnya dahulu, baru kemudian dibahas bersama DPR.

Politikus asal dapil Sulawesi Selatan ini memperkirakan, besaran asumsi makro bisa saja berubah drastis dibandingkan dengan yang diusulkan Presiden pada 14 Agustus 2015 lalu. Pasalnya, keadaan sekarang sudah sangat berbeda.

“Yang kami lihat, asumsi makro akan berubah. Kita sepakat kalau pemerintah optimis, tapi kita juga harus hati-hati jangan sampai optimis itu tidak tercapai lagi. Kita harus kembali bagaimana supaya hal ini realistis, tapi realistis yang dimaksud adalah sudah ada optimis dari pemerintah, bukan dari kondisi pasar yang ada. Sehingga ada ekstra *effort* yang dilakukan oleh pemerintah,” harap Amir.

Dalam kesempatan itu, Amir juga berharap, Kementerian PPN/Bappenas dapat menjalankan fungsi sebagai koordinator rencana pembangunan secara nasional, mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah

“Bappenas harus mengarah kemana supaya anggaran-anggaran itu tidak sia-sia turun ke daerah. Anggaran tidak sia-sia dikelola oleh kementerian dan lembaga, sehingga tujuan rencana program kita bisa tercapai. Terutama dari target-target kemasyarakatan, seperti menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan lapangan kerja, dan lain-lain,” harap Amir sambil mengatakan hal ini dapat dibahas bersama Komisi XI. (SF1/FOTO:JAKA/PARLE/HR)

ASUMSI MAKRO RAPBN 2016 JANGAN TERLALU OPTIMISTIS

Asumsi Makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2016 sedang dibahas di Komisi XI DPR bersama Pemerintah. Anggota Komisi XI Willgo Zainar mengingatkan Pemerintah agar dalam pembahasan anggaran untuk tahun depan, jangan terlalu optimistis.

Demikian ia sampaikan di sela-sela

Rapat Kerja antara Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPB/Kepala Bappenas, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Gubernur Bank Indonesia, di Gedung Nusantara I, Senin (21/09/15) malam. Raker dipimpin Ketua Komisi XI Fadel Muhammad (F-PG, Dapil Gorontalo).

“Kita sepakat, kondisi saat ini sangat



Anggota Komisi XI Willgo Zainar

berbeda dengan pembahasan RAPBN ataupun APBN-Perubahan 2015 lalu. Sekarang, kita perlu optimis, tapi kita juga perlu realistis. Kita terlalu optimis, tapi kita sulit untuk mencapai realisasinya,” ingat Willgo.

Politikus F-Gerindra ini juga mengingatkan, ada beberapa indikator realisasi APBN 2015 ini yang harus menjadi pertimbangan dalam RAPBN 2016. Misalnya, terkait penerimaan negara yang diprediksi tidak akan maksimal, dan bertengger di angka 90 persen dari target. Termasuk angka pertumbuhan ekonomi yang di kuartal II 2015 ini baru 4,7 persen, dari target 5,6 persen. Pada 2016, diprediksi berada di 4,7 -5,3 persen.

“Termasuk akan ada penyesuaian di kurs rupiah. Estimasi awal di angka Rp 13.400 sampai Rp 13.900 per dolar Amerika Serikat, sekarang batas bawahnya di angka Rp 13.900, dan batas atasnya bisa Rp 14.300-Rp 14.500 per dolar AS. Mungkin agak sedikit realistis. Kalau lebih daripada itu, itu terlalu optimistik,” analis Willgo.

Tak dipungkiri, lanjut Willgo, ditundanya keputusan kenaikan suku bunga acuan AS oleh The Fed, diakui turut mempengaruhi kondisi ekonomi nasional, khususnya kesepakatan RAPBN 2016.

“Saya kira, keputusan FED menjadi seluruh acuan di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Sampai pada saat keputusan, yang sebenarnya sudah kita tunggu dari lama, keputusan FED untuk menunda ini menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan asumsi makro kita di RAPBN 2016,” saran Willgo.

Politikus asal dapil NTB ini pun berharap kepada Pemerintah agar memperhatikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, karena menjadi tumpuan dalam menggerakkan roda perekonomian. Pemerintah diharapkan memberikan dukungan dari sisi permodalan, melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun kredit lainnya, untuk menstimulus UMKM.

“UMKM menjadi tumpuan harapan kita saat ini, dimana sektor industri, komoditas ekspor dan migas kita menga-

lami penurunan. UMKM tidak memiliki utang luar negeri, UMKM juga berbasis produk yang asli, tidak ada komponen impor yang menjadi bahan bakunya, dan juga padat karya, sehingga sebetulnya banyak menyerap tenaga kerja. Tinggal bagaimana permodalan, dan produk UMKM untuk memenuhi kebutuhan nasional dulu,” papar Willgo.

Willgo juga berharap kepada dana transfer daerah dan dana desa yang nilainya mencapai Rp 782,2 triliun agar dapat memberikan penetrasi perekonomian di masyarakat.

“Kita harapkan dana transfer ini dapat memberikan penetrasi, sehingga ekonomi berbasis desa ataupun pertanian, dan UMKM ini untuk segera ditumbuhkan, sehingga dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi kita, di saat ekonomi kita saat ini sedang melemah,” kata Willgo sembari mengingatkan Pemerintah untuk selalu waspada terhadap berbagai kondisi yang berpotensi memberikan pengaruh kepada ekonomi nasional. (SF)/FOTO:JAKA/PARLE/HR

Legislator Dukung Penguatan Kapasitas Lembaga Perlindungan Anak



Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid

Indonesia sebagai negara yang bermartabat, tapi kejahatan terhadap anak jumlahnya sangat mengerikan, lebih dari 21 juta kasus. Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid sangat setuju dengan yang direkomendasikan Komnas Perlindungan Anak tentang pentingnya pengembangan penguatan kapasitas lembaga perlindungan anak di Indonesia.

“Realisasi penguatan lembaga perlindungan anak akan berdampak positif pada peningkatan anggaran, penguatan kewenangan, dan penguatan advokasi perlindungan anak,”kata Hidayat, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII dengan Komnas Perlindungan Anak dan ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), Senin (21/9/2015), di Gedung DPR RI.

Ia menjelaskan bahwa sesungguhnya Komisi VIII telah mengambil keputusan bersama dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA), Linda Amalia Sari Gumelar (Tahun 2009-2014) lalu untuk meningkatkan status kementerian ini tidak lagi sekedar Kementerian Negara. Diharapkan nantinya Komnas PA dan lembaga lain menjadi bagian dari kementerian yang secara spesifik sesuai dengan tupoksinya untuk melindungi perempuan dan anak.

“Dulu nomenklaturinya kementerian negara dan sudah disepakati siapapun yang menjadi presiden dan menteri agar statusnya ditingkatkan menjadi

kementerian. Kalau statusnya naik maka selain kewenangan, kapasitas, personil, dan anggarannya pasti menguat,” ungkapnya.

Menurut Hidayat, Komisi VIII juga telah mendorong Menteri PP dan PA untuk mengingatkan Presiden segera merealisasikannya. “Saya merasa optimis dengan diubahnya menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi kalau dilihat dari kewenangan maupun anggarannya masih sama saja seperti yang lalu. Malah dibanding dengan dulu anggarannya turun, ini aneh bin ajaib,” keluhnya.

Dia menambahkan realisasi penguatan lembaga perlindungan anak, salah satu caranya adalah Komnas PA dan ACWC turut mendorong Menteri PP dan PA untuk merealisasikan yang telah disepakati dengan Komisi VIII. Untuk merealisasikan penguatan status dari kementerian ini betul-betul menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Kementerian penuh yang sama dengan kementerian yang lain. (AS) FOTO: ANDRI/PARLE/HR

Komisi XI Dukung Pembangunan Bandara dan Pelabuhan di Yogyakarta

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merencanakan membangun Bandar Udara Internasional baru dan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta. Kedua rencana ini mendapat apresiasi dan dukungan dari DPR RI, walaupun sejumlah catatan turut menyertainya.

Anggota Komisi XI DPR Hatta mengingatkan, agar pembangunan ini harus direncanakan secara matang. Pasalnya, lokasi yang baru ini dinilai terlalu jauh dari pusat kota. Apalagi, Yogyakarta juga merupakan destinasi pariwisata, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu jumlah kunjungan wisatawan.

Demikian dikatakan Hatta usai pertemuan dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, Bank Indonesia Perwakilan DI Yogyakarta, Kementerian Keuangan DI Yogyakarta, Otoritas Jasa Keuangan DI Yogyakarta, Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta, Bappeda DI Yogyakarta, dan asosiasi pengusaha di Kantor Perwakilan DI Yogyakarta, Kamis (17/09/15).

“Menurut saya, hal ini harus betul-betul terencana secara baik. Karena saya melihat Yogya juga sebagai destinasi pariwisata, tidak sama dengan kota lain yang memiliki destinasi bisnis, seperti Jakarta atau Surabaya,” kata Hatta.

Hatta melihat, masalah jarak antara bandara baru dengan pusat kota Yogyakarta ini terlalu jauh, sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Apalagi, pariwisata juga merupakan tulang punggung ekonomi Yogyakarta. Setidaknya, jarak antara Kulon Progo ke



Anggota Komisi XI DPR Hatta

Yogyakarta sekitar 60 kilometer.

“Yogyakarta sebagai destinasi pariwisata, wisatawan ingin akses mudah mencapai lokasi. Kalau mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh ke kota, saya khawatir, akan menurunkan minat wisatawan,” ujar politikus F-PAN ini.

Untuk itu, ia menyarankan, jika memang Bandara Adi Sucipto, di Yogyakarta, sudah overload, maka sebagian penerbangan bisa di relokasi ke bandara terdekat, misalnya Bandara Adi Soemarmo, Solo. Pasalnya, hingga saat ini, bandara ini dikabarkan terus merugi.

“Jika bandara Yogya ini sudah *overload*, bisa direlokasi ke Surakarta. Masih banyak terbuka kesempatan, apalagi bandaranya (Adi Soemarmo) masih merugi. Kenapa Angkasa Pura

tidak membuka atau memberikan akses itu kepada Bandara Adi Soemarmo. Kalau sebagian penerbangan dari dan ke Yogya di-split ke Solo, maka kedua bandara akan sehat,” analisis politikus asal dapil Jawa Tengah ini.

Sementara terkait rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulon Progo, Hatta mendukung penuh. Namun ia menyarankan, pelabuhan itu bukan hanya untuk pelabuhan ikan saja, tetapi juga pelabuhan peti kemas, sehingga potensi ekspor dari Yogyakarta bisa dimaksimalkan.

“Kalau di selatan dibangun pelabuhan laut, saya malah setuju, bisa membuka jalur ekspor dari Yogya dan sekitarnya. Sehingga ekspor tidak harus selalu dari Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, tapi juga dari Yogyakarta. Daya saing produk lokal Yogya yang sangat luar biasa, itu bisa langsung ekspor ke negara tujuan,” harap Hatta.

Dukungan juga datang dari Anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar. Politikus F-Gerindra itu berharap, rencana ini agar segera dapat direalisasikan. Hal ini untuk mendorong arus perdagangan berbagai produk, seperti *manufacture*, kerajinan, furniture, dan lain sebagainya.

“Saya kira rencana pembangunan pelabuhan di wilayah selatan Yogyakarta sudah melalui kajian yang mendalam oleh Pemprov DIY dan Pemerintah pusat. Saya kira ini perlu segera direalisasikan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Yogyakarta yang saat ini sekitar 4,7 persen,” harap politikus asal dapil NTB itu. (SF)/FOTO:SOFYAN/PARLE/HR



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berdialog dengan jajaran Kemenhan

KOMISI I DUKUNG PENGUATAN PANGKALAN TNI DI PULAU NATUNA

Terkait isu Laut Cina Selatan, Komisi I mengkalkulasi ada eskalasi ketegangan di kawasan tersebut. Komisi I DPR mendukung Kementerian Pertahanan memperkuat pangkalan Tentara Nasional Indonesia di Pulau Natuna.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan eskalasi ketegangan di Laut Cina Selatan ini juga sangat mungkin dipengaruhi oleh pertarungan ekonomi antara Cina dengan Amerika. Menurutnya Indonesia tidak bisa menutup mata bahwa banyak kasus konflik politik dan militer juga akan didorong oleh konflik kepentingan ekonomi.

“Jadi tadi Komisi I minta Kementerian Pertahanan untuk merespon sekaligus mengantisipasi terjaganya kepentingan nasional Indonesia, jika kasus Laut Cina Selatan ini semakin eskalatif,” kata Mahfudz, usai Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Senin (21/9/2015), di Gedung DPR RI.

Mahfudz, menjelaskan bahwa Kemhan bersama TNI, memang sudah menyiapkan langkah-langkah itu, termasuk di-

antaranya penguatan pangkalan TNI di Pulau Natuna, namun karena ini suatu program yang disesuaikan dengan kondisi mutakhir sehingga belum terakomodir oleh dukungan anggaran.

Alutsista TNI mempunyai kesiapan pergeseran kekuatan ke sana, namun perlu peningkatan sarana dan prasarananya seperti untuk pangkalan udara, *run way*, pelabuhan kapal angkatan laut.

“Kita menyetujui usulan TNI untuk melakukan realokasi atau pergeseran anggaran di Kemenhan dan TNI sekitar sebesar Rp.450 Milyar untuk kebutuhan penguatan pangkalan TNI di Pulau Natuna,” ungkap Mahfudz Siddiq. (AS)

FOTO:NAEFUROJI/PARLE/HR.

BALEG DPR SIAP BAHAS RUU PENJAMINAN

Badan Legislasi DPR RI (Baleg) akan melakukan pembahasan RUU Penjaminan bersama pemerintah. Pembahasan RUU ini akan mulai dibahas pada Senin (28/9/2015) yang akan datang. Berdasarkan Surat Presiden (Surpres), pihak pemerintah yang mendapatkan penugasan membahas RUU ini antara lain Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan Menteri Hukum dan HAM.

“Baleg telah menerima penugasan dari Pimpinan DPR untuk melakukan pembahasan RUU Penjaminan bersama pemerintah berdasarkan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah tanggal 2 September 2015,” terang Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo saat memimpin Rapat Pleno Baleg dengan Agenda Pembahasan Jadwal Acara Pembahasan RUU Penjaminan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (21/9/2015).

RUU Penjaminan ini merukan RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI. Firman mengharapkan, RUU Pertama yang disahkan DPR RI pada tahun 2015 ini. “*Inshaallah* ini yang menjadi betul-betul pecah telur UU yang akan diundangkan pada tahun 2015 ini. Dan *inshaallah* diikuti oleh UU yang lainnya. Tapi kelihatannya satu-satunya mungkin RUU Penjaminan ini,” harap politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Oleh karena hal tersebut, jelas Firman, rapat Baleg tersebut akan membahas agenda jadwal acara pembahasan RUU Penjaminan dan penjelasan Tim Ahli Baleg mengenai kajian terhadap Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Penjaminan yang disampaikan pemerintah.

Ia menjelaskan, jadwal pembahasan RUU Penjaminan ini disusun bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan. Selanjutnya Anggota DPR RI dari Komisi IV ini menginformasikan, bahwa Panja RUU Penjaminan akan melakukan Kunjungan Kerja ke beberapa daerah dan apabila dimungkinkan juga akan melakukan kunjungan dalam rangka diplomasi parlemen kedua negara yaitu Italia dan Jepang.

“Perlu kami sampaikan, mengapa dipilih Italia dan Jepang, pertama Italia sudah sangat berhasil baik dari regulasinya, dan fungsi-fungsi penjaminan untuk UKM sudah sangat berhasil. Kedua, keberhasilan Jepang dalam penjaminan untuk skala menengah ke atas,” terangnya.



Wakil Ketua Baleg DPR Firman Subagyo

Menurutnya, idealnya RUU Penjaminan tidak hanya fokus pada usaha kecil dan menengah tapi juga pada sektor menengah ke atas. “Ini pertimbangan-pertimbangan jika nanti kita mengambil kesimpulan,” ujarnya.

Pada rapat tersebut, Anggota Baleg DPR Al Muzzammil (F-PKS) mengusulkan sebelum melakukan pembahasan DIM, Tim Ahli DPR dan Tim Ahli Pemerintah terlebih dahulu bertemu untuk membahas DIM RUU Penjaminan terlebih dahulu. Ia mempertanyakan, apakah DIM yang disampaikan kepada anggota Baleg merupakan hasil kesepakatan dengan pemerintah.

Sementara, Anggota Baleg DPR Misbakhun (F-PG) berdasarkan penilaiannya terhadap DIM dari Pemerintah, pemerintah memiliki *mindset* yang berbeda dengan DPR. Hal tersebut, bisa dilihat dari judul yang diusulkan pemerintah berbeda dengan dari DPR. Ia sepakat dengan Al Muzzammil agar Tim Ahli pemerintah bertemu terlebih dahulu dengan Tim Ahli Baleg. (SCI)/FOTO:ANDRI/PARLE/IW

Tahun ini Katering Haji Lebih Baik, Kesehatan Perlu Peningkatan



Tim Pengawas Haji saat mengunjungi balai pengobatan Haji

Wakil Ketua Tim pengawas haji Komisi VIII DPR RI, Deding Ishak mengatakan berdasarkan pengamatannya beserta Tim ia menilai bahwa pelayanan katering bagi Jamaah haji tahun ini relatif lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut diungkapkannya langsung dari tanah suci Mekkah melalui pesan singkat yang disampaikan kepada Parlemen, Senin (21/9).

“Pelayanan katering bagi jamaah calon haji tahun ini relatif

lebih baik dibanding tahun lalu. Bahkan jamaah mengusulkan agar di Makkah diberikan makan minimal 2x sehari, kalau sekarang kan masih 15 x makan dalam 15 hari, jadi sehari baru satu kali,” ujar Deding.

Tidak hanya itu, Tim pengawas haji DPR juga melihat layanan katering yang disajikan bagi jamaah calon haji sudah memenuhi cita rasa Indonesia. Sementara itu, dalam hal kesehatan menurut Deding masih perlu peningkatan lagi.

Hal itu terlihat dari masih terbatasnya jumlah petugas medis, seperti dokter dan perawat di klinik satelit di Maktab. Padahal menurut informasi yang diterima Tim Pengawas, sebanyak 60 persen jamaah haji Indonesia beresiko tinggi alias tanda merah dan kuning.

Selain itu Tim pengawas Haji DPR RI juga menerima keluhan jamaah terkait ruang klinik yang masih di bawah standar. Obat-obatan khususnya yang terkait dengan penyakit pernafasan juga masih sangat terbatas.

Oleh karena itu menurut Deding, hal itu menjadi catatan penting untuk perbaikan kualitas pelayanan haji di tahun berikutnya. Lebih jauh ia berharap agar pelaksanaan ibadah haji di Armina nanti berjalan dengan lancar, kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji mabrur. (AYU FOTO: DOK/

PARLE/HR

UMKM HARUS DAPAT SENTUHAN PERBANKAN



Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan

Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan mengatakan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus mendapat perhatian, khususnya dari dunia perbankan. Pasalnya, UMKM sudah menjadi pilar ekonomi yang diharapkan.

Demikian dikatakan Marwan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR saat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi DI

Yogyakarta, Bank Indonesia Perwakilan DI Yogyakarta, Kementerian Keuangan DI Yogyakarta, Otoritas Jasa Keuangan DI Yogyakarta, Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta, Bappeda DI Yogyakarta, dan asosiasi pengusaha di Kantor Perwakilan DI Yogyakarta, Kamis (17/09/15).

“UMKM tetap bisa tumbuh, namun harus mendapat sentuhan kemudahan dari perbankan. Seribu dua ribu UMKM di Yogyakarta kita perbaiki, kita berikan apa yang mereka butuhkan,” kata Marwan.

Politikus F-PD ini mengingatkan, basis utama ekonomi masyarakat Yogyakarta adalah UMKM, dimana bidang lain tidak begitu andil dalam roda ekonomi. Apalagi, Yogyakarta juga tidak memiliki industri besar yang diharapkan.

“UMKM menjadi pilar terakhir yang kita harapkan dari ekonomi kita, dimana saat ini komoditas, manufacturing, dan sumber daya mineral tidak bisa diharapkan, minyak tidak ada, ya UMKM

bisa kita harapkan,” imbuh Marwan.

Dari hasil diskusi, Marwan menyimpulkan setidaknya ada dua langkah yang diambil Pemerintah untuk mendukung UMKM. Pertama, melalui kredit perbankan. Namun ternyata, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini disuarakan Anggota Dewan, ternyata implementasinya tidak begitu lancar.

“Terbukti dengan adanya *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang masih berada di angka 60 persen, padahal kan kita berharap dana di pihak ketiga setelah ditabung ke bank itu kembali kepada masyarakat,” imbuh politikus asal dapil Lampung itu.

Berikutnya, terkait dengan kebijakan perpajakan. Marwan agak kecewa, karena selama ini UMKM masih menjadi sasaran utama wajib pajak. Padahal, untuk menjalankan operasionalnya, UMKM masih tertatih-tatih. Ia meminta ada kebijakan yang membuat UMKM bernapas lebih lega lagi.

“UMKM ini, yang belum tumbuh terlalu signifikan, di dalam kondisi kesulitan ekonomi saat ini, justru tidak mendapatkan kemudahan dari perpajakan, Malah menjadi target utama pungutan pajak. Padahal banyak perusahaan besar yang siap untuk dikejar

pajaknya,” kata Marwan.

Marwan yakin, jika UMKM di Yogyakarta dapat berjalan baik, maka akan menjadi role model bagi daerah lain.

Masih dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR, Mohammad Hatta menyatakan, terkait pembebasan pajak untuk UMKM, merupakan kebijakan yang cukup baik. Jumlah karyawan dan omset bisa menjadi pertimbangan untuk pembebasan pajak.

Soal pemberian kredit juga mendapat sorotan politikus F-PAN itu. Ia menegaskan, pemberian kredit sampai Rp 25 juta seharusnya tidak perlu meng-

gunakan agunan.

“Ke depan kita meminta BI dan OJK untuk membuat pelarangan itu. Jika sampai ada yang menyalurkan KUR masih meminta imbalan, kita harus memberikan sanksi kepada instansi itu. Karena itu sudah dijamin Pemerintah, dan tak ada alasan untuk menolak pengajuan KUR,” tegas politikus asal dapil Jawa Tengah itu.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar. Sektor UMKM menjadi sektor yang lebih menjanjikan dibanding industri *manufacture* yg berbahan baku impor, harga

minyak dan komoditas yang sedang jatuh.

“UMKM menjadi andalan untuk menggerakkan perekonomian dan pertumbuhan nasional. Karena itu kita mendorong sektor perbankan untuk mengucurkan KUR dan pembiayaan sektor UMKM dengan bunga yang lebih kompetitif lagi,” harap politikus F-Gerindra itu.

Politikus asal dapil NTB itu berharap, bunga untuk sektor UMKM di bawah 12 persen, dan dengan syarat yang lebih ramah kepada UMKM. Termasuk kredit tanpa agunan untuk kredit maksimal 25 juta, harapnya. (SFI)/FOTO: SOFYAN/PARLE/IW.



Anggota Komisi VIII DPR Itet Tridjajati Sumarijanto

Anggota Komisi VIII DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto, mengkhawatirkan masalah perlindungan kepada anak. Dia melihat kasus-kasus kekerasan yang

KEKERASAN TERHADAP ANAK MASALAH SERIUS

menimpa anak-anak sekarang ini sudah mejadi masalah yang serius.

“Masalah perlindungan anak, merupakan masalah yang serius. Saya mengkhawatirkan masa depan anak-anak Indonesia. Kalau anak-anak seperti ini, masa depan bangsa ini bagaimana?,”ungkap itet, saat Komisi VIII Rapat dengar Pendapat umum membahas Perlindungan Anak, dengan Komnas Perlindungan Anak dan ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC), Senin (21/9/2015), di Gedung DPR RI.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) ini memandang kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, maka kelembagaan yang menangani perlindungan

terhadap anak harus diperkuat.

“Karena itu kelembagaan perlindungan terhadap anak harus diperkuat, sehingga ada komitmen dari politik anggaran dalam hal perlindungan anak,”kata Itet.

Selain itu, dia juga menginginkan adanya kajian pencegahan kekerasan terhadap anak. Dan adanya pemetaan dari jenis kasus termasuk jumlahnya, sehingga dapat diketahui penanganan pencegahan maupun diketahui penyebabnya.

“Dasar untuk mencari solusi dan membuat keputusan yang tepat dalam pencegahannya adalah melalui pendataan. Selain itu, dunia pendidikan juga diharapkan dapat ikut mencegah timbulnya kekerasan terhadap anak,” tegasnya. (ASI)/FOTO: NAEFURODJI/PARLE/HR

KOMISI I SAMBUT BAIK RENCANA ATASE PERTAHANAN DIBAWAH KEMHAN

Komisi I menyambut baik ide atau rencana Kementerian Pertahanan untuk mengkonsolidasi keberadaan atase pertahanan di sejumlah negara, baik yang selama ini dimanfaatkan sebagai atase pertahanan ataupun untuk penempatan atase pertahanan yang baru. Karena keberadaan atase pertahanan selama ini ada dibawah koordinasi Badan Intelijen Strategis di Mabes TNI.

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengatakan, Kementerian Pertahanan menyampaikan kembali rencananya untuk atase pertahanan sebagai instrumen intelejen pertahanan di bawah Kementerian Pertahanan, yang sebelumnya di bawah koordinasi Bais Mabes TNI.



Pimpinan Komisi I DPR

Menurut Komisi I, itu merupakan sesuatu ide yang baik, karena itu merupakan *best prestige* di banyak negara, tetapi masalah ini tidak bisa dilakukan serta merta, karena menyangkut Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia.

“Memang ada perpres terbaru yang mengeluarkan aturan baru, tetapi agar ada sinkronisasi produk hukum maka Komisi I berpandangan Menhan dan Panglima TNI secara

intensif membicarakan hal ini. Termasuk kalau ide ini disepakati maka dibutuhkan penyesuaian dari sisi peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Selain itu, Komisi I juga mendorong penguatan program *cyber defence* untuk TNI, dan minta pandangan TNI mengenai ide pembentukan Badan Cyber Nasional, sebab di banyak negara *cyber* sudah menjadi bagian dari pertahanan. (ASI)

FOTO:NAEFUROJI/PARLE/HR.

DUA RUU SEGERA DISAHKAN PARIPURNA

Dua RUU yang masuk Prolegnas segera disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR. Kedua RUU itu adalah RUU tentang Perubahan UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, serta RUU Kebudayaan.

Bila ini disahkan, maka ada dua produk UU monumental kembali yang dihasilkan DPR RI. Anggota Baleg DPR Endang Srikarti Handayani kepada Perlementaria menjelaskan, dua RUU ini sudah dibahas di Baleg. RUU TKI merupakan usulan Komisi IX dan RUU Kebudayaan usulan dari Komisi X. Kedua produk RUU ini sudah diharmonisasi dan melewati tahap kajian di Baleg.

Diterangkan politisi Partai Golkar itu, yang penting dari RUU TKI adalah di mana pun seorang WNI bekerja harus mendapat perlindungan hukum yang memadai. Dan RUU ini memfasilitasi semua perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Sementara RUU Kebudayaan melindungi kekayaan tradisi etnik yang hidup di Nusantara.

“Komjen dan Kedubes kita di luar negeri jarang sekali memberi advokasi dan



Anggota Baleg DPR Endang Srikarti Handayani

pengawasan bagi TKI. Pendampingan terhadap TKI yang tersangkut masalah hukum di negara tempat mereka bekerja jarang sekali dilakukan. Dan RUU ini memberi kepastian perlindungan yang optimal,” jelas politisi dari dapil Jawa Tengah V tersebut.

Selama ini, keluarga TKI sering berjuang sendirian tanpa pendampingan. Kalau pun ada bantuan hukum selalu datang terlambat. Dengan RUU ini, kata Endang, keluarga TKI yang

ingin menemui keluarganya di luar negeri betul-betul dibantu oleh negara. “Negara harus bertanggung jawab atas penempatan TKI di luar negeri, karena dia membawa devisa bagi negara,” ujar Endang lagi.

Sementara pada bagian lain, RUU Kebudayaan menjamin semua kekayaan budaya Indonesia mendapat perlindungan yang memadai. Tari-tarian khas Nusantara juga kelak mendapat perlindungan hukum. Jadi tidak sekadar pelestarian, RUU ini memberi perlindungan. Endang mencontohkan, ada tradisi nuju bulan di berbagai daerah. Ini merupakan tradisi yang hidup di tengah masyarakat Nusantara. Dengan RUU Kebudayaan, tradisi semacam ini dilindungi.

“Tradisi ngaben yang agamis di Bali juga mendapat perlindungan. Tradisi ini hanya ada di Bali. Walau ada agama Buddha di daerah lain, tapi ngaben sangat khas di Bali. Jadi RUU Kebudayaan melindungi sampai ke hal-hal seperti itu,” terang Endang. (MH)/FOTO:ANDRI/PARLE/IW.

YOGYAKARTA MASIH MEMBUTUHKAN PERHATIAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II pada 2015 ini sebesar 4,72 persen. Angka ini meningkat cukup signifikan dibanding triwulan I yang hanya 4,20 persen. Inflasi berada di angka 5,13 persen pada triwulan pertama, dan 5,68 persen pada triwulan pertama.

Hal ini mendapat cukup apresiasi dari Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR saat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, Bank Indonesia Perwakilan DI

Yogyakarta, Kementerian Keuangan DI Yogyakarta, Otoritas Jasa Keuangan DI Yogyakarta, Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta, Bappeda DI Yogyakarta, dan asosiasi pengusaha di Kantor Perwakilan DI Yogyakarta, Kamis (17/09/15). Padahal, ekonomi nasional saat ini mengalami penurunan.

“Jika kita melihat pertumbuhan ekonomi Provinsi DI Yogyakarta, memang ada peningkatan. Kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, ini sedikit lebih baik. Untuk di Yogyakarta, persoalan ini karena adanya



Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan saat penyerahan cinderamata

ketimpangan pembangunan antara Yogyakarta kawasan utara, dengan Yogyakarta kawasan selatan,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan, usai pertemuan.

Marwan menambahkan, ketimpangan pembangunan di kawasan selatan, paling terlihat terutama daerah Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul. Sehingga terungkap dalam pertemuan, setidaknya ada 10 desa di Yogyakarta yang belum baik akses transportasinya.

“Ini kan sangat miris. Sehingga didapatkan satu contoh model, dan tidak perlu mencari model sampai jauh ke timur Indonesia, bahwa di sebuah daerah di DI Yogyakarta, yang tidak terlalu jauh dari Jakarta, masih ada ketimpangan pembangunan antara selatan dan utara, yakni di daerah-daerah terpencil,” jelas politikus F-Partai Demokrat itu.

Untuk itu, Marwan menambahkan, dari hasil kunjungan kerja Komisi XI ke Yogyakarta ini didapatkan bahwa Yogyakarta pun masih membutuhkan perhatian dari Pemerintah Pusat. Dimana satu sisi, perhatian Pemerintah Pusat pun harus merata ke seluruh Indonesia.

“Kami menemukan bahwa pembangunan ke depan itu tidak harus mutlak ke Indonesia Timur, ternyata Pulau Jawa masih butuh perhatian. Ini akan kami sampaikan pada pembahasan RAPBN 2016. Ini memperlihatkan, daerah-daerah tertentu di Pulau Jawa masih membutuhkan sentuhan khusus dari Pemerintah,” imbuh Marwan.

Politikus asal dapil Lampung ini juga menilai, akibat ketidakmerataan pembangunan ini menyebabkan ketidakmerataan kemakmuran, yang berimbas pada gap gini rasio yang cukup tinggi. Walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Yogyakarta tinggi, namun angka kemiskinan juga tinggi.

“Ketidakmerataan kemakmuran ini sangat terlihat. IPM-nya mungkin ditunjang dari sektor pendidikan, karena Yogyakarta memiliki banyak kampus. Sektor kesehatan juga bagus, karena masyarakatnya sehat-sehat. Namun, poin pendapatan yang agak kurang. Sehingga, meskipun IPM tinggi, tingkat

kemiskinan juga tinggi. Ini bisa kita konfirmasi di angka gini rasio yang cukup jauh. Hampir peringkat lima terburuk nasional,” imbuh Marwan.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR, Mohammad Hatta (F-PAN) menilai, melambatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 karena menurunnya daya beli masyarakat dan melemahnya nilai tukar rupiah, yang berimbas pada segala komoditi. Dengan adanya pelemahan komoditi, maka ekonomi juga akan melemah.

“Yogyakarta, sebagai salah satu tujuan pariwisata, otomatis juga terkena imbasnya. Karena orang tidak akan berwisata, jika tidak memiliki uang. Harus ada antisipasi dari Pemprov. Misalnya dengan membuka destinasi pariwisata baru yang menarik. Misalnya Gunung Kidul, itu pantainya banyak yang menarik dan indah. Ini harus dieksplorasi,” saran politikus asal dapil Jawa Tengah itu. (SF) FOTO: SOFYAN/PARLE/IW.

TAK PERLU IMPOR BERAS, KUATKAN PERAN BULOG

Pemerintah sudah seharusnya setop melakukan impor beras. Pasalnya, produksi padi tahun 2015 berdasarkan data BPS bisa mencapai 75,5 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).

“Kalau dikonversi ke beras, dengan asumsi GKG = 62,74% beras, maka total produksi beras tahun 2015 adalah 75,5 juta ton X 62,74 = 47,40 juta ton.” Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan di Jakarta, Selasa (22/9) malam.

Berdasarkan perhitungan Bappenas, konsumsi beras per tahun hanya mencapai 29 juta ton dengan asumsi jumlah penduduk sebesar 250 juta orang. Dari perhitungan itu, berarti kita surplus sebesar 47,40 juta ton dikurangi 29 juta ton = 18,9 juta ton pertahun.

Heri mengungkapkan, dalam 3 sampai 4 bulan ke depan produksi beras bisa mencapai 15,8 juta ton, sedangkan konsumsi hanya 9,5 juta ton. “Berarti ada surplus 6,3 juta ton. Di sinilah peran Bulog diperlukan untuk bisa menyerap sebesar-besarnya beras dari petani,” ungkapnya.

Bulog harus mampu meningkatkan tingkat penyerapannya yang baru mencapai 4,69% atau 2,2 juta ton ke



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

kisaran 8-10%. Dengan begitu, Bulog akan lebih mempunyai peran maksimal kestabilan stok dan harga beras nasional.

Pimpinan Komisi bidang perdagangan dan BUMN ini mengatakan, Bulog

pernah mendapat PMN TA 2015 sebesar Rp3 triliun yang harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan penyerapan gabah/beras. Untuk tahun 2016 mendatang, Bulog kembali mengusulkan PMN sebesar Rp2 triliun untuk pembangunan infrastruktur pengeringan, pengolahan, dan penyimpanan beras di sentra-sentra produksi padi.

Dengan tingkat penyerapan yang maksimal, Bulog akan lebih berfungsi sebagai stabilitor dan *buffer stock* yang kuat. Sebagai lembaga yang strategis, Bulog bisa lebih maksimal dalam melakukan stabilitas harga dengan menjaga stok.

“Tentunya hal ini perlu dukungan serius Pemerintah, terkait regulasi atas peran Bulog. Ujungnya, kita tidak perlu lagi impor beras yang hanya akan menjadi permainan para mafia,” tutup Heri. (SPY,MP) FOTO: ANDRI/PARLE/HR

Pelayanan Haji di Armina Meningkatkan Signifikan



Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq bersama Tim Pengawas Haji DPR di Saudi Arabia

Anggota Tim Pengawas haji Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menilai ada peningkatan yang signifikan pelayanan haji di daerah Armina (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) pada tahun ini.

Hal itu diungkapkannya melalui pesan yang disampaikan kepada Parlemen usai melakukan pengawasan dan pengecekan persiapan

PPIH Kementerian Agama dalam mempersiapkan prosesi ibadah di kawasan Armina, Sabtu (19/9).

“Secara keseluruhan Armina sudah siap menerima Para Tamu Allah untuk Wukuf dan Mabit. Ada peningkatan yang signifikan yang saya lihat, tenda yang terlihat kokoh. Beberapa karpet baru. Fasilitas *aircooler* (pendingin)

juga tersedia,” ungkap Maman.

Dijelaskan Maman, Tim pengawas DPR memeriksa berbagai fasilitas dan sarana jemaah haji selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Diantaranya dapur umum, kamar mandi, tenda, alat pendingin (*water cooler*), karpet, dan ketersediaan air.

Semua fasilitas itu menurut Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Saleh Partaonan Daulay sejatinya sesuai janji Kementerian agama kepada DPR ketika pembahasan BPIH. Termasuk penyediaan sarana *water cooler* yang baru tahun ini diadakan.

Ditambahkan Saleh berdasarkan pantauannya, setiap maktab akan diisi oleh kurang lebih 3.000 jamaah. Dimana setiap maktab disediakan 10 kamar mandi laki-laki dan 10 kamar mandi perempuan. Setiap maktab akan difasilitasi *water cooler* sebanyak 60 unit. Sementara karpet yang disediakan di seluruh maktab Indonesia merupakan fasilitas yang diberikan oleh muassasah secara gratis.

Meski demikian dilanjutkan Maman, ketersediaan toilet atau WC umum akan terasa kurang jika jamaah sudah terkonsentrasi di sana. Selain itu menurut Politisi dari Fraksi PKB ini, yang juga harus diantisipasi adalah suhu yang menurut Menag akan mencapai 50 derajat celsius. (AYU) FOTO:DOK./PARLE/HR

Pemberdayaan Pemuda Harus Ditingkatkan

Anggota Komisi X DPR My Esti Wijayanti menekankan pentingnya pemberdayaan pemuda, agar tercipta calon generasi penerus bangsa yang dapat memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Hal itu dapat dilakukan melalui berbagai program kerja di Deputy Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Demikian ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Selasa (22/09/15). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X Abdul Kharis Almasyari.

“Letak penggodokan pemuda di Deputy Pemberdayaan Pemuda. Bertugas untuk memfasilitasi pemuda untuk lebih berkontribusi kepada bangsa dan



Anggota Komisi X DPR My Esti Wijayanti

negara. Ideologi Pancasila dan Trisakti yang diterjemahkan kepada Program Nawa Cita di Pemerintahan Presiden Joko Widodo, sudah ada rencana strategis Deputy ini,” kata Esti.

Ia menyatakan apresiasi kepada program kerja yang dipaparkan Deputy Pemberdayaan Pemuda. Berbagai program kerja itu memiliki landasan yang jelas, serta tujuan yang jelas pula. Sehingga, program-program itu semata bukan hanya untuk program saat ini saja.

Namun politikus F-PDI-Perjuangan ini menyangkan, Deputy belum bisa menjelaskan hasil dari berbagai program itu. Selain itu, masalah anggaran juga menjadi sorotan Esti.

“Anggaran terlalu sedikit untuk Deputy ini. Kita harus mengawali di tahun ini, dengan cita-cita untuk bisa lebih mengedepankan anak muda sebagai generasi penerus bangsa kita, mengawal bangsa kita. Dengan berpijak pada Pancasila dan UUD 1945,” kata Esti.

Jika anggaran sudah memadai, Esti berharap, jangkauan pemberdayaan pemuda bukan hanya untuk segelintir pemuda saja, tapi bisa menyeluruh ke semua pemuda di 34 provinsi.

“Kita harus membangun mentalitas

karakter bangsa, memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang Pancasila secara lebih mendalam, kemudian dikhususkan kepada keberagaman, toleransi yang dibangun, dari masing-masing kepribadian anak-anak kita, itu menjadi kekuatan bangsa kita ke depan,” harap Esti.

Sehingga, dengan kekuatan mental yang mumpuni, generasi muda tidak akan mudah terkoyak isu-isu anti toleransi, isu pemecah belah, dan lain se-

bagainya.

Politikus asal dapil Yogyakarta ini juga mengingatkan, Pemerintah harus memiliki *roadmap* yang jelas hingga masa depan. Jadi, bukan hanya sekarang dilatih, namun ke depannya di lepas lagi.

“Sekarang kita punya berbagai rencana program, pelatihan misalnya, itu ke depannya akan seperti apa. Tidak sekali ini selesai. Langkah ke depannya harus kita perluas,” saran Esti.

Deputi Pemberdayaan Pemuda, memiliki beberapa program yang menjadi unggulan, diantaranya Pemuda Maritim, Pemuda Revolusi Mental Anti Narkoba, Pemuda Kreatif, Sekolah Pemuda untuk toleransi antar umat beragama, Pemuda Cinta Damai untuk Resolusi Konflik, dan Pemuda Mandiri Energi dan Pangan. Pada RAPBN 2016, Deputi Pemberdayaan Pemuda diusulkan mendapat anggaran Rp 224 miliar. (SF) FOTO: JAKA/PARLE/HR

Eksekutif Lebih Banyak Habiskan Anggaran Daripada DPR

Pos anggaran untuk tunjangan jabatan para pejabat eksekutif ternyata jauh lebih besar daripada para anggota DPR RI. Belum lagi soal fasilitas yang diberikan, DPR jauh lebih minim daripada fasilitas jabatan yang diterima eksekutif. Lalu, mengapa publik dan media massa malah mem-bully tunjangan jabatan yang diterima Anggota DPR?

Pertanyaan kritis tersebut disampaikan Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono, Kamis sore (17/9), di ruang kerjanya. Menurut Bambang, selama ini tidak ada kesetaraan anggaran yang diterima tiga lembaga, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dari ketiganya, legislatif menerima paling kecil. Bambang membandingkan anggaran tunjangan jabatan yang diterima seorang menteri dengan seorang anggota DPR.

Bila seorang menteri pergi ke daerah, dipastikan ia membawa pejabat eselon I atau II. Belum lagi saat berada di daerah, para kepala daerah dipastikan berdatangan untuk menyambut menteri. Itu saja sudah menghabiskan anggaran yang sangat besar. Belum termasuk anggaran pengawalannya. DPR tak menerima itu semua. Miliaran rupiah bisa dihabiskan dalam seminggu, bila ada kunjungan ke daerah atau luar negeri oleh seorang menteri.

“Coba lihat ruangan menteri yang jadi pembantu presiden. Mestinya menteri itu sejajar dengan tenaga ahli (TA) anggota DPR yang sama-sama pembantu. Harusnya anggaran menteri pun sebagai pembantu presiden sejajar dengan tenaga ahli sebagai pembantu anggota DPR. Mereka (TA) tidak punya ruangan dan kendaraan. Sementara menteri dapat kendaraan sedan crown yang



Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono

nilainya saja sudah melebihi dari Rp1 miliar,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.

Sementara fasilitas ruangan anggota DPR hanya 3x6 m, sangat kecil bila dibandingkan dengan ruangan menteri yang notabene jabatannya di bawah anggota DPR. Ruangan sekecil itu pun harus dihuni oleh enam orang, lima staf dan satu anggota DPR. Di Amerika, seorang senator memiliki lima staf yang ditempatkan di ruang masing-masing. Lihat ruangan seorang menteri yang seperti aula dengan fasilitas sangat mewah.

Sekali-kali publik juga bisa melihat langsung ruang para anggota DPR di Gedung Nusantara I. Sebagai pejabat negara, anggota DPR sejajar dengan presiden. Idealnya, gaji dan tunjangan jabatan yang diterimanya pun setara dengan presiden. Tapi, faktanya anggaran dan fasilitas yang diterima anggota DPR masih di bawah anggaran seorang menteri yang seorang pembantu presiden.

Dengan fakta ini, mestinya publik membuka mata, betapa pemborosan itu sesungguhnya terjadi di eksekutif. Ironisnya, fasilitas mobil yang diberikan

kepada seorang dirjen saja jauh lebih mewah daripada anggota DPR. Dirjen bisa menerima sedan Camry. Begitu juga dirut bank BUMN bisa menerima Mercedes Benz S Class 400. “Tapi anggota DPR hanya diberikan Rp90 juta untuk beli mobil selama satu periode,” kilah politisi dari dapil Jatim I ini.

Tunjangan jabatan yang diterima presiden, sambung Bambang, jauh lebih heboh lagi bila dibanding anggota DPR. Ketika presiden berkunjung ke daerah, ada banyak menteri yang diajak. Belum lagi banyak gubernur, bupati, dan wali kota yang ikut menyambut, plus TNI/Polri sebagai petugas pengamanan. Itu belum menghitung anggaran saat rombongan presiden berkunjung ke luar negeri.

“Berapa miliar yang dihabiskan. Mungkin bisa seratus miliar yang dihabiskan (dalam satu kali kunjungan). Itu dalam satu minggu bisa dua kali,” imbuh Bambang lagi. Dengan fakta ini publik dan media massa harus *fair* menilai, mana yang lebih besar menghabiskan anggaran negara. Bila kemudian DPR menuntut tambahan anggaran tunjangan jabatan, itu sangat logis dan realistis.

“Mari kita buka berapa anggaran pemerintah untuk pergi ke luar negeri. Di kementerian dalam satu bulan bisa lebih dari 10 kali ke luar negeri. Presiden dalam seminggu bisa dua kali ke luar kota maupun luar negeri. Bila presiden datang ke daerah, berapa ribu tentara dan polisi yang mengamankan. Bisa 3.000 personil. Kalau anggaran Rp100 ribu saja untuk akomodasi di sana, maka akan ketemu Rp3 miliar,” ungkap anggota Komisi VI DPR ini. (MH) FOTO: NAEFURODJI/PARLE/IW.

RASKIN BERUBAH MENJADI RASTRA



Suasana Raker Komisi IV DPR dengan Perum Bulog

Ketua Komisi IV Edhy Prabowo mengatakan Beras Raskin (Raskin) kini berubah nama menjadi Beras Sejahtera (Rastra). Menurutnya ada harapan jangan lagi disebut Beras Miskin (Raskin), tidak enak juga, maka diubah menjadi beras

Sejahtera (Rastra). Tapi intinya itu sampai kepada Rumah tangga Sasaran (RTS).

“Beras Sejahtera ini diartikan jangan menganggap mendeskreditkan orang, supaya bahasa penyebutannya lebih enak didengar. Yang paling penting bukan namanya tapi yang paling penting adalah kualitasnya yang sampai kepada RTS tidak berketu, berbau dan pecah pecah sehingga kualitasnya harus terjamin,” kata Edhy Prabowo. Setelah Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Perum Bulog, Kamis (17/9/2015), di Gedung DPR, Jakarta.

Selanjutnya, Politisi Partai Gerindra ini mengaspresiasi kinerja Bulog atas realisasi pelaksanaan subsidi Rastra Tahun 2015. Bulog sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 telah melaksanakan 89% atau Rp17 Triliun, dari pagu Subsidi Rastra Tahun 2015 sebesar Rp18,939 Triliun.

Kemudian untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap ketahanan pangan, Komisi IV menyetujui usulan tambahan anggaran Bulog pada APBN 2015 sebesar Rp3,373 Triliun, yang dialokasikan untuk tambahan 2 kali penyaluran beras di bulan September dan November 2015. (AS) FOTO:RIZKA/PARLE/IW

Pimpinan BKSAP DPR Kecam Perusakan Masjid Al-Aqsha

Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR mengemukakan keras tindakan perusakan yang dilakukan aparat keamanan Israel terhadap Masjid Al-Aqsha. BKSAP menilai aksi ilegal tersebut dapat memicu ketegangan di kawasan dan dunia Islam.

“Kerusakan parah pada beberapa bagian Masjid Al-Aqsha akibat ulah aparat Israel itu sangat memalukan dunia internasional, terutama PBB. Saya mendukung penuh permintaan OKI yang meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera menghentikan aksi kekerasan itu,” ujar Nurhayati Ali Assegaf, Ketua BKSAP DPR.

Dalam *Press Release* yang diterima Parlemen Kamis (17/9) lebih jauh politisi Partai Demokrat tersebut mendesak DK PBB untuk melindungi warga Palestina dari aksi brutal aparat Israel, terutama mereka yang bertahan di dalam Masjid Al-Aqsha untuk menghalangi aparat Israel yang merangsek masuk ke dalam Masjid Al-Aqsha.

Pada sisi lain, Nurhayati mengingatkan bahwa Israel tak punya wewenang apapun terhadap wilayah yang di atasnya berdiri Masjid Al-Aqsha. “Harus diingat bahwa Yerusalem Timur yang lokasi Al-Aqsha berada itu merupakan



Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf

wilayah yang dicaplok Israel dalam perang Enam Hari tahun 1967. Sampai saat ini hukum dan komunitas internasional belum mengakui wilayah itu sebagai bagian dari Israel,” imbuh Nurhayati.

Dia juga curiga bahwa aksi Israel ini dilakukan sebagai bentuk *show of force* pascapersetujuan PBB atas sebuah resolusi yang mengizinkan bendera Palestina dan juga Vatikan berkibar

di Markas PBB. “Ini bentuk teror yang lebih jauh terhadap PBB,” sorotnya.

Sementara itu Rofi Munawar, Wakil Ketua BKSAP, mengingatkan tindakan brutal Israel atas Israel dapat memicu ketegangan dunia internasional dan menyurutkan prospek perdamaian Palestina-Israel. “Penyerangan itu tidak sekadar meningkatkan ketegangan di kawasan, tapi juga meluas ke negara-negara Muslim. Ini karena Al-Aqsha salah satu situs paling disucikan umat Islam, sehingga penyerangan itu juga dapat memunculkan sentimen agama. Demikian juga masa depan perdamaian konflik Palestina-Israel semakin suram,” kata Rofi.

Politisi PKS itu juga menyoroti ketidakberdayaan DK PBB ketika berhadapan dengan Israel. “PBB seperti biasa tidak berdaya saat Israel melakukan pelanggaran. Ini sangat memalukan. PBB sudah lama perlu direformasi. Indonesia harus terus menyuarakan reformasi PBB,” kritik dia.

Rofi juga mengingatkan bahwa penyerangan Israel atas Masjid Al-Aqsha sudah berkali-kali. “Penyerangan ini sudah sering, terutama kalau bertepatan dengan momentum tertentu seperti menjelang datangnya Tahun Baru Ya-

hudi baru-baru ini. Ini seharusnya bisa dicegah. Seharusnya aparat Israel dapat mencegah kelompok ekstrim Yahudi yang terus melakukan penyerangan itu,” papar dia.

BKSAP saat ini telah menerima informasi dari Parlemen negara-negara OKI (PUIC) terkait penyerangan tersebut.

Parlemen Palestina telah menyurati negara-negara anggota PUIC untuk meminta pertemuan darurat membahas peristiwa tersebut menyusul bentrok berkelanjutan antara warga Palestina dan tentara Israel di Masjid Al-Aqsa.

Bentrokan tersebut menyebabkan

beberapa bagian Masjid Al-Aqsa rusak. Pemerintah Amerika Serikat dan PBB menyatakan prihatin dengan kekerasan yang terjadi. Raja Yordania memperingatkan Israel bahwa setiap aksi Israel akan mempengaruhi hubungan Yordania dengan Israel. (BKSAP,MP) FOTO:IWAN ARMANIAS/PARLE/HR

Komisi IV Desak Pemerintah Terbitkan Payung Hukum Perkuat Bulog

Dalam rangka Pemerintah menguasai stok Pangan pokok dan pangan strategis minimal 10 persen dari kebutuhan konsumsi pangan nasional pertahun, Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk menerbitkan payung hukum untuk memperkuat Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai stabilisator harga berbagai komoditas pangan pokok dan pangan strategis.

Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar Ichsan Firdaus, mengatakan Bulog telah diputuskan sebagai lembaga yang berperan menjadi stabilisator dan buffer stok bagi pangan nasional, yang hanya beras tetapi juga bisa jagung, kedelai, daging, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, Komisi IV mendorong Bulog agar menjadi lembaga ketahanan pangan nasional dan menjaga stabilitas pangan nasional. “Kita perlu payung hukum yang jelas bahwa Bulog tidak hanya berperan untuk beras tapi untuk pangan yang lainnya,” kata Ichsan, disela Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Perum Bulog, (17/9/2015) di Gedung DPR, Jakarta.

Menurutnya, hal ini terkait juga dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa perlunya ada Badan pangan nasional yang berperan sebagai stabilisator dan *buffer stock* pangan nasional. Komisi IV menginginkan Bulog berperan sebagai Badan



Anggota Komisi IV DPR Ichsan Firdaus

Pangan Nasional.

“Karena selama ini harga pangan selalu diserahkan kepada mekanisme pasar. Kita tidak mau karena pangan ini merupakan suatu kebutuhan strategis yang sangat fundamental bagi rakyat. Bulog harus didorong sebagai Badan pangan Nasional,” tegas Ichsan firdaus.

Hal ini kembali ditegaskan Ketua Komisi IV Edhy Prabowo, Bulog merupakan lembaga yang strategis untuk menstabilkan harga dan menjaga stok pangan nasional. Komisi IV ingin Bulog berperan serta terutama keberadaan kebutuhan pangan cukup, Bulog harus diperankan kembali untuk menstabil-

kan harga dan menjaga stok kebutuhan pangan.

“Komisi IV meminta Pemerintah segera menerbitkan payung hukum untuk memperkuat Perum Bulog,” kata Edhy Prabowo.

Kepala Perum Bulog Djarot Kusumayakti menjelaskan terkait kelembagaan sementara ini Bulog hanya menyangkut beras, dan ini sudah disampaikan kepada Presiden mengenai payung hukum perlindungan Bulog jika harus juga harus melakukan pengadaan daging, jagung, dan produk pangan lainnya.

Djarot mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, yang intinya ingin segera memberikan payung hukum perlindungan. “Presiden berkeinginan Bulog mampu mengamankan pangan yang sensitif baik terhadap inflasi maupun kebutuhan rakyat banyak,” kutipnya.

Ia menambahkan ada 11 bahan pangan pokok yang sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang penting. “Perpres 71 untuk perdagangan yang dikaitkan dengan bulog, namun kita (Bulog) akan terus menggali payung apa jika Bulog harus menjadi penjamin stabilisasi harga,” terangnya. (AS) FOTO:RIZKA/PARLE/HR

Panja Pelindo II Bongkar Tiga Masalah Krusial

Panja Pelindo II yang dibentuk Komisi VI DPR RI akan membongkar tiga kasus krusial yang menyelimuti PT. Pelindo II. Ketiganya adalah perpanjangan kontrak Hutchison Port Holding (HPH), pengadaan *mobile crane*, dan etika pejabat

Pelindo II.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan, Kamis (17/9) di DPR. Setelah melakukan rapat perdana, Panja menilai ada pelanggaran serius UU No.17/2008 tentang

Pelayaran yang dilakukan Pelindo II. Perpanjangan kontrak pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT) oleh HPH asal Hongkong itu mestinya baru bisa dilakukan pada 2019, karena di tahun itulah kontrak berakhir. Tapi, Pelindo II sudah memperpanjang hingga 2038.

“Di Pasal 344 UU No.17/2008 disebutkan tiga tahun setelah UU ini berlaku, maka semua perusahaan pelabuhan harus merujuk pada UU ini. Jadi, 2011



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

dimulai pemberlakuan. Seharusnya Pelindo II menggunakan prosedur UU tersebut untuk meminta hak konsesi. Ironisnya, nilai kontrak yang diteken Pelindo II dengan Hutchison tersebut jauh lebih kecil dibanding konsesi pertama. Padahal, produktivitas JICT naik terus dan meningkat,” urai politisi dari dapil Jabar IV ini.

Harusnya yang berhak memperpanjang kontrak, sambung Heri, adalah Kementerian Perhubungan, bukan Pelindo II. Dalam konteks ini, Pelindo adalah operator bukan regulator. Dan regulator yang dimaksud tentu Kemenhub dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut. Dalam rapat Panja tersebut terungkap, ternyata tiga Menteri Perhubungan sudah mengingatkan Dirut Pelindo II untuk mencabut perpanjangan konsesi dengan HPH. Tiga Menhub itu Freddy Numberi, EE. Mangindaan, dan seka-

tang Ignasius Jonan.

Persoalan krusial kedua adalah pengadaan *mobile crane* yang diduga menyalahi aturan perundang-undangan. Pembelian *crane* yang tidak difungsikan hingga tiga tahun jadi temuan tersendiri. Bahkan, menurut Heri, temuan indikasi koruptif ini telah mengorbankan mantan Kabareskrim Budi Waseso yang dimutasi ke BNN.

Sedangkan persoalan etika yang akan diungkap Panja, lanjut Heri, terkait dengan menurunnya produktivitas Pelindo II pasca peristiwa Dirutnya RJ. Lino yang berkomunikasi dengan pejabat pemerintah secara terbuka di depan media. “RJ. Lino telah menciptakan iklim yang kurang kondusif dan menurunkan produktivitas korporasi. Sejak kasus ini mencuat, ada beberapa karyawannya yang dimutasi,” ujar Heri.

(MH) FOTO:ANDRI/PARLE/HR

KETUA DPR LANTIK LIMA PIMPINAN MADYA SETJEN DPR RI



Pelantikan 5 Pimpinan Tinggi Madya Setjen DPR RI

Ketua DPR Setya Novanto melantik 5 (lima) Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI hari ini, Kamis (17/9/2015) di Pustakaloka Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Lima pejabat tersebut antara lain Winantuningtyastiti sebagai Sekretaris Jenderal DPR RI, K. Johnson Rajagukguk sebagai Kepala Badan Keahlian, Setyanta Nugraha sebagai Inspektur Utama, Achmad Djuned sebagai Deputy Administrasi, dan Damayanti sebagai Deputy Bidang Persidangan.

Kelima pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal tersebut dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/M/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/M/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Madya di Lingkungan Sekretaris Jenderal DPR RI.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah usai pelantikan kepada media menyatakan struktur Sekretariat Jenderal DPR RI yang baru ini dimaksudkan agar kekuatan Setjen dan Badan Keahlian itu sama. Di satu sisi administratif, dan Badan Keahlian di sisi lain menjadi kekuatan intelektual.

“Dimana-mana di negara demokrasi itu yang menonjol itu *resources center* seperti pada Badan Keahlian. DPR ini bukan hanya sebagai sumber berita tapi juga sumber ilmu pengetahuan. Itu merupakan ciri dari parlemen modern,” tegas Fahri.

Menurutnya, lembaga ini menjadi kuat, jika sistem pendukungnya kuat maka akan semakin kuat. “Karena dengan cara itulah kemudian dewan akan menghasilkan produksi keputusan-keputusan dan kebijakan yang mantap,” tukasnya.

Pada pelantikan tersebut dihadiri pula Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Taufik Kurniawan, Pimpinan BURT DPR RI Roem Kono, Akhmad Dimiyati Natakusuma dan Agung Budi Santoso, Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Setjen DPR RI, Pejabat Fungsional Setjen DPR RI dan undangan. (SC) FOTO:ANDRI/PARLE/IW.

Prosedur Pendaftaran Merek Akan Disederhanakan

RUU Pansus Merek akan menyempurnakan perubahan substansi UU Nomor 15 tahun 2001 tentang merek dengan melakukan penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran merek.

“Ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemohon merek sehingga lebih memudahkan bagi pemohon dalam melakukan pendaftaran merek,” ujar Wakil Ketua Pansus RUU Merek Refrizal saat Kunker RUU Pansus Merek di Surabaya, Kamis, (17/9).

Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum permohonan, lanjutnya, akan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dengan cukup mengisi formulir permohonan, melampirkan etiket atau contoh merek yang dimohonkan pendaftaran, dan



Wakil Ketua Pansus RUU Merek Refrizal

membayar biaya permohonan.

“Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum permohonan

tersebut, suatu permohonan merek akan diberikan tanggal penerimaan atau *filing date*,” paparnya.

Selain itu, meluasnya globalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa internasional juga menuntut perlindungan merek bagi produk nasional di negara tujuan ekspor.

Dia menambahkan, mekanisme pendaftaran merek internasional menjadi salah satu sistem yang dapat dimanfaatkan guna melindungi merek-merek nasional di dunia internasional.

“Sistem pendaftaran merek Internasional berdasarkan “Protocol Madrid” menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau,” paparnya. (SI) FOTO: SUGENG/PARLE/HR

Nurdin Tampubolon Optimis Target Pertumbuhan Ekonomi 2016 Tercapai



Anggota Komisi XI DPR Nurdin Tampubolon

Anggota Komisi XI DPR Nurdin Tampubolon optimis, target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang disepakati Komisi XI DPR dan Pemerintah dapat tercapai. Sebagaimana diketahui, Selasa (22/09/15) lalu, Komisi XI dan Pemerintah menyepakati asumsi makro RAPBN 2016, dimana salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen.

“Walaupun hingga Agustus 2015 pertumbuhan baru 4,7 persen, tetapi, peningkatan terserapnya anggaran di akhir tahun 2015 ini, pasti akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Kami optimis pertumbuhan ekonomi

yang kita tetapkan 5,3 persen dapat tercapai,” kata Nurdin, ketika ditemui di Gedung Nusantara I, Rabu (24/09/15).

Politikus F-Hanura itu menilai, kesepakatan besaran asumsi makro 2016 sudah tepat dan realistis. Jika semua program Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla dijalankan dengan baik, maka semua target itu dapat tercapai.

Sebelumnya, asumsi makro 2016 yang disepakati meliputi, Pertumbuhan ekonomi: 5,3 persen, Inflasi: 4,7 persen, Nilai tukar rupiah: 13.900, dan Suku bunga SPN 3 bulan: 5,5 persen.

Sementara untuk target Target pembangunan, meliputi Tingkat pengangguran: 5,2-5,5 persen, Tingkat kemiskinan: 9,0-10,0 persen, Gini rasio sebesar 0,39, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,10.

“Itu angka-angka yang menurut kami, paling pas untuk dilaksanakan. Kalau memang semua nanti program-program yang direncanakan Pemerintah dijalankan dengan baik, maka asumsi makro tadi sudah sangat realistis,” harap Nurdin.

Politikus asal dapil Sumatera Utara ini juga yakin, dengan berbagai kebijakan ekonomi yang dicanangkan Pemerintahan Joko Widodo, kesepakatan besaran asumsi makro dapat dicapai. Terutama Kebijakan September 1 yang belum lama ini diluncurkan Pemerintah.

“Dengan berbagai kebijakan-kebijakan Pemerintah, misalnya Kebijakan September 1, kami masih yakin pertumbuhan ekonomi bisa dicapai 5,3 persen,” yakin Anggota Badan Anggaran DPR ini. (SF) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR

PEMERINTAH SAUDI DIMINTA SEGERA UMUMKAN JUMLAH KORBAN TRAGEDI MINA

Tim Pengawas Haji DPR RI mendesak pemerintah Saudi untuk segera merelease jumlah korban tragedi Mina. Pasalnya, hingga saat ini jumlah korban yang diumumkan masih simpang siur dan kelihatannya masih terus bertambah. Selain itu, asal negara-negara korban juga belum pernah disampaikan secara resmi.

“Sekarang ini, yang disampaikan hanyalah total jumlah korban. Sementara, negara-negara korban belum pernah diumumkan. Bahkan, jenis kelamin para korban saja pun tidak disampaikan,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay melalui pesan singkatnya, Jumat (25/9) dini hari.

Pemberitahuan tentang jumlah korban dan asal negaranya dinilai Saleh sangat penting, terutama untuk menenangkan keluarga para jamaah haji yang ada di negara masing-masing. Menurutny setelah delapan jam pasca kejadian, seharusnya informasi tentang asal negara korban sudah bisa diketahui.

“Kalau nama dan negara-negara korban tidak diumumkan, ada kesan seolah-olah ada yang ditutup-tutupi. Sebagai penanggung jawab haji, pemerintah Saudi tentu memiliki tanggung jawab besar dalam menangani masalah ini,” papar Politisi dari Fraksi PAN ini.

Sewaktu tim pengawas DPR RI mengadakan kunjungan langsung ke tempat pelontaran jumroh malam Kamis atau



Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay

Jumat dini hari ini, ia bertemu dengan jamaah haji dari berbagai negara. Hampir semuanya menyatakan bahwa mereka juga belum mengetahui jumlah jamaah haji yang korban dari negaranya. Itu berarti, masing-masing negara memperoleh informasi dari tim dan misi haji mereka.

“Info yang diperoleh negara-negara yang jadi korban adalah atas usaha mereka sendiri, bukan atas informasi resmi pemerintah Saudi ke misi haji negara-negara asal korban,” pungkasnya. (AYU) FOTO: DOK./PARLE/HR

UU MEREK HARUS BERPIHAK PADA PEDAGANG KECIL



Wakil Ketua Pansus RUU Merek, Refrizal, dalam Forum Legislasi

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Merek, yang saat ini sedang dibahas oleh Pansus, ditujukan untuk melindungi kepentingan lokal. Apalagi, di penghujung tahun ini Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

“Interesnya itu melindungi kepentingan nasional. Jadi ini yang perlu dida-

hulukan dalam pembahasan RUU Merek tersebut,” kata Wakil Ketua Pansus RUU Merek, Refrizal, dalam Forum Legislasi bertema “RUU Tentang Merek” di Pressroom DPR, Gedung Nusantara III, Selasa (22/09/15).

Refrizal menambahkan, RUU Merek ini nantinya juga akan berpihak kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM), dengan memberi kemudahan kepada UMKM untuk mendaftarkan mereknya.

“Selama ini pemerintah sudah memberikan subsidi dengan menggratiskan biaya notaris. Jadi biaya notaris ini ditanggung oleh negara,” imbuh politikus F-PKS itu.

Diharapkan dengan adanya RUU ini, lanjut Refrizal, juga akan mempercepat pengurusan pendaftaran merek bagi UMKM. Karena selama ini salah satu kendala dari UMKM adalah untuk mendaftarkan merek ke Kemenkumham terlalu lama.

“Bahkan Pemerintah kadang melanggar sendiri soal batas waktu yang ditentukan soal lamanya tenggang pengurusan,” tambah politikus asal dapil Sumatera Barat itu.

Anggota Komisi VI ini optimis, pembahasan RUU Merek ini bisa selesai sekitar Maret-April 2015. “Pansus inginnya cepat selesai. Saya kalau bekerja ingin cepat. Tapi bukan asal kerja,” yakin Refrizal.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Pakar Hukum Perdata Uni-

versitas Indonesia, Agus Sardjono mengatakan, masyarakat lokal perlu difasilitasi pemerintah terkait merek ini. Pemberian merek juga harus mempertimbangkan etika, sehingga tidak bertentangan dengan agama, nilai-nilai masyarakat, kesusilaan dan sebagainya.

“Pasal 46 disebutkan bahwa pemberdayaan kolektif menengah, bisa didaftar oleh Pemerintah Daerah. Standarnya dan kualitasnya harus sama, tapi boleh pakai merek sendiri atau individu. Jadi, dengan UU ini, merek ini bisa didaftar oleh Pemda untuk menjaga kualitas unggulan lokal,” papar Agus.

Agus menemukan, masih adanya inkonsistensi atau rumusan ragu-ragu pada sejumlah pasal RUU Merek ini. Misalnya, jenis merek suara dimasuk-

kan dalam RUU tersebut, di sisi lain, soal merek aroma tidak diatur. Selain itu, dalam naskah akademik, Agus menilai cakupannya sangat luas, karena memasukkan soal merek suara, hologram dan tiga dimensi.

Namun, ketika dimasukkan dalam bentuk draft RUU, justru agak berbeda karena hanya dibatasi pada persoalan grafis seperti yang tertera pada pasal 2 ayat 3 di RUU itu. Tapi dalam RUU ini ternyata juga memasukan masalah merek suara dalam pasal 12 ayat 2.

“Ini semakin memperlihatkan RUU Merek penuh dengan keraguan. DPR RI harus memperbaiki dan memutuskan. Pansus harus konsisten antara naskah akademik dan naskah RUU sendiri,” saran Agus.

Pengurus Harian YLKI, Tulus abadi, menilai saat ini ada gerakan kepentingan global, dikhawatirkan akan mematikan produk dan kepentingan lokal. Sehingga, RUU ini bisa menjadikan penggerak ekonomi nasional bukan kepentingan global.

Sementara dari sisi Pengusaha Sepatu, Egar Putra Bahtera, mengatakan seluruh *stakeholder* harus mengembangkan merek lokal, namun berkualitas standar internasional, sehingga masyarakat mencintai produk lokal. “UMKM tidak di back-up pemerintah, perlu adanya kolaborasi, untuk hadapi MEA,” saran Egar. (SF,NT,SC) FOTO:ANDRI/PARLE/IW.

RUU MEREK CEGAH MARAKNYA MEREK ASING ILEGAL



Tim Pansus RUU Merk dipimpin Refrizal himpun masukan di Surabaya

Wakil Ketua Pansus RUU Merek Refrizal mengatakan, kuatnya arus globalisasi di segala bidang, termasuk sektor perdagangan barang dan jasa, yang sudah tidak mengenal lagi batas-batas wilayah negara, membuat suatu regulasi di bidang Hak Kekayaan In-

telektual (HKI) termasuk merek harus mampu memenuhi perkembangan yang ada serta efektif dalam memberikan jaminan hukum bagi merek yang telah didaftarkan.

“Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubu-

ngannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan saat ini,” ujarnya Refrizal selaku ketua tim rombongan saat Kunker RUU Merek di Surabaya, Kamis, (17/9).

Menurutnya, pentingnya suatu merek merupakan konsekuensi Indonesia yang telah menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 2 November 1994, yang memuat Lampiran *Aggrement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPs).

“Tujuan Perjanjian TRIPs adalah memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan prosedur penegakkan hak menuju perdagangan yang sehat,” paparnya.

Dia menambahkan, ratifikasi beberapa konvensi internasional di bidang merek merupakan bentuk kesadaran Indonesia untuk menjadi bagian dari pergaulan dunia, yang diharapkan dapat memberikan manfaat lebih baik bagi perkembangan perdagangan secara khusus dan perekonomian nasional pada umumnya. (SI) FOTO: SUGENG/PARLE/HR



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Wakil Ketua Fadli Zon dan Ketua F-PKS Jazuli Juwaini saat menemui jamaah RI korban tragedi Mina. Kamis (24/09)
Foto: Dok./Parle/HR



Panja Pelindo II Komisi VI DPR RI memanggil Dirut PT Pelindo II RJ Lino membahas kinerja perseroan dan kasus penggeledahan Bareskrim Polri terkait adanya dugaan korupsi tentang pengadaan mobile crane, Jakarta, Rabu (16/9). Foto: Andri/Parle/HR



Badan Anggaran DPR RI dipimpin Ahmadi Noor Supit menerima Delegasi Parlemen Tiongkok
Foto: Naefuroji/Parle/HR